



## UNIVERSITAS SYIAH KUALA UPT. PERPUSTAKAAN

Jalan T. Nyak Arief, Kampus UNSYIAH, Darussalam – Banda Aceh, Tlp. (0651) 8012380, Kode Pos 23111  
Home Page : <http://library.unsyiah.ac.id> Email: [helpdesk.lib@unsyiah.ac.id](mailto:helpdesk.lib@unsyiah.ac.id)

### ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH

#### TITLE

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH

#### ABSTRACT

##### RINGKASAN

Penulisan laporan kerja praktek ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak dan juga untuk menambah wawasan dan informasi tentang pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas. Penulis melaksanakan kerja praktek lapangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Banda Aceh dan penulis ditempatkan pada subbagian perencanaan dan keuangan.

Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam laporan kerja praktek, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pertanahan Nasional merupakan suatu lembaga non kementerian yang dipimpin oleh kepala dan mempunyai tanggung jawab kepada presiden. Badan pertanahan nasional tidak hanya melaksanakan tugas di bidang pertanahan secara nasional, tetapi secara regional dan sektoral juga. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pertanahan Nasional melaksanakan beberapa fungsi, diantaranya adalah pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum, perumusan kebijakan di bidang pertanahan, dan sebagainya.

Saat melaksanakan tugas atau kegiatan, maka akan membutuhkan dana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk mendapatkan dana tersebut Bendahara pengeluaran harus membuat buku perencanaan agar tidak terjadi kesalahan, dengan demikian bendahara pengeluaran mempunyai buku control agar tidak terjadi kelebihan pengeluaran.

Bendahara Penerimaan selaku orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, mentorkan dan menatausahakan serta mempertanggungjawabkan setiap penerimaan Negara yang kemudian dipergunakan lagi bagi kantor/ satuan kerja bersangkutan, sangat perlu dibekali dengan pemahaman tentang penatausahaan.